

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS UTAMA DESA
PAKRAMAN (MUDP) TERKAIT KEDUDUKAN PEREMPUAN HINDU BALI
SEBAGAI AHLI WARIS**

**(Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,
Bali)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum

Oleh :

NI KETUT NOVITA SARI

NIM. 115010101111087



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN PESAMUHAN AGUNG III MAJELIS
UTAMA DESA PAKRAMAN (MUDP) TERKAIT KEDUDUKAN
PEREMPUAN HINDU BALI SEBAGAI AHLI WARIS
(Studi di Desa Pakraman Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar, Bali)**

**Ni Ketut Novita Sari., Rachmi Sulistyarini, S.H.,MH.,Ratih Dheviana Puru
HT.,S.H.,LLM**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: sarinovita12@yahoo.com

ABSTRAK

Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) merupakan keputusan yang dibuat oleh lembaga yang terdiri dari bendesa adat seluruh Provinsi Bali. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah (a) Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris; (b) Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris; Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan Sosiologis Yuridis, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP ini kurang efektif, karena masyarakat masih kukuh menggunakan awig-awig. Faktor yang menghambat pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP yaitu hambatan yang terkait substansi, struktur, dan kultur hukum. hambatan yang terkait substansi bahwa keputusan pesamuhan agung masih bersifat pasif dan kurang bersifat aplikatif, Hambatan terkait struktur masih ada pro dan kontra dalam MUDP dan hambatan terkait kultur hukum ada pada budaya, dimana sistem Patrilineal, terikat kesatuan kebudayaan Bali dengan kesatuan Agama Hindu yang tidak lepas dengan Hukum Adat Bali. Upaya mengatasi hambatan perlu Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif, dan membuka diri, dan merubah pola pikir masyarakat

Kata kunci : Pesamuhan Agung, Perempuan Hindu dan ahli waris.

ABSTRACT

The Assembly General decision III Main Pakraman (MUDP) is a decision made by the institution consisting of Adat's chief on the entire province of Bali. The issues in the paper, are: (a) How the implemantation concerning MUDP's decision related to the position of Hindu's women in Bali as the inheritance; (b) What is the obstacles and the effort in the implementation of MUDP III's decision related to the position of Hindu's women in Bali as the inheritance. The type of legal research in this paper, is empiric legal research, uses juridicial sociological approach. The research result shows that implementation of the MUDP III's decision is less effective, because society still use *awig-awig*. The obstacles factor of implementation MUDP III's decisions related to substance, structure and legal culture. The substance obstacles, that the MUDP's decision still passive and not applicable. The structure obstacles is there are some pro and contra in the MUDP and the last obstacles related to legal culture, where the patrilineal system, related to unity of Bali culture and the unity of Hindusm which cannot separated to Bali Adat Law. The effort to resolve the obstacles, need to disseminate the result of decision, systematically, structurally and massive. Also, opening up and society mindset changing.

Keywords : General Assembly, Hindusm women and the inheritance.

PENDAHULUAN

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang lahir dan berkembang dari tingkah laku masyarakat, dalam hidupnya sehari-hari, memiliki sifat yang tegas dan berwujud hukum yang positif. Sehingga dalam kehidupannya masyarakat harus melaksanakan aturan-aturan tingkah laku tersebut. Adapun pengertian hukum adat menurut beberapa orang ahli hukum.

1. Soepomo memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislative (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.¹

¹ Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan asas-asas hukum adat**, PT toko gunung agung, Jakarta, 1967, hlm. 14

2. Sukanto, mengartikan Hukum Adat sebagai *kompleks adat-adat* yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.²
3. Van Vollen Hovan, mengartikan hukum adat sebagai peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dianggap patut dan mengikat warga masyarakat serta ada perasaan umum bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh penegak hukum.

Konteks hukum adat terdapat peraturan mengenai hukum adat waris yang meliputi norma-norma untuk menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.³ Hukum waris adat memuat garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemindahannya dari pewaris kepada ahli waris.

Pembagian waris adat menggunakan sistem garis keturunan dan sistem kewarisan yang dimana setiap wilayah itu berbeda-beda. Susunan garis keturunan pria (patrilineal), garis keturunan perempuan (matrilineal), dan susunan menurut garis pria/perempuan (parental/bilateral). Dan sistem kewarisan yang dianut dalam hukum adat di Indonesia yaitu kolektif, mayorat dan individual.

Dalam susunan kekerabatan yang cenderung mempertahankan garis keturunan pria (patrilineal) sebagaimana berlaku di Bali pada umumnya yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah kaum pria, yaitu ayah atau pihak saudara pria dari ayah. Sedangkan kaum perempuan bukan ahli waris. Hukum adat Bali mengenal beberapa aturan tentang pewarisan sejak tahun 1900 sampai sekarang. *Paswara* 13 Oktober 1900, *awig-awig*⁴ tertulis Desa Pakraman, dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

² I Nengah Lestawi, **Hukum Adat**, Paramita, Surabaya, 1999, hlm.4

³ Soerojo Wignjodipoero, *ibid*, hlm.161

⁴ *Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh karma desa pakraman dan atau karma banjar adat yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan Dharma agama di desa pakraman atau banjar pakraman masing-masing. (Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman)

Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III/2010 diputuskan mengenai kedudukan suami-istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya, termasuk hak waris anak perempuan (anak kandung maupun anak angkat).

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas terdapat fenomena permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Hindu Bali yang dimana perempuan tidak mendapatkan hak atas warisan meskipun sudah ada keputusan yang menyatakan bahwa perempuan mendapatkan bagian setengah dari waris *purusa* (ahli waris laki-laki) setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Atas dasar tersebut penulis akan menganalisis:

1. Bagaimana Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali Sebagai Ahli Waris?
2. Apa hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris?

PEMBAHASAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif (Penggambaran). Penelitian ini menggambarkan tentang kajian terhadap masalah hukum terutama terkait pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris. Jenis pendekatan yang dipergunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan keputusan pesamuhan agung III majelis utama desa pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) Data, yaitu:

- a. Data primer yakni bahan hukum yang terdiri:

1. Opini dan Pendapat

- b. Data sekunder merupakan Data yang diperoleh dari Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), hasil penelitian orang lain, artikel-artikel dari internet dan surat kabar, dan literatur hukum baik buku maupun jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian tentang judul yang diangkat oleh penulis.

Pengumpulan data dilakukan melalui hasil wawancara bebas dan survey di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai data primer dan melalui studi kepustakaan, studi berkas-berkas yang ada diperpustakaan sebagai data sekunder.

Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencari kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

1. Pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait Kedudukan Perempuan Hindu Bali sebagai Ahli Waris.

Sebagaimana untuk dapat melihat berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dapat menggunakan teori Lawrence M Friedman, dilihat melalui tiga elemen yaitu:⁵

a. Substansi

Substansi hukum dalam kaitannya dengan peraturan, dalam hal ini terdapat 3(tiga) tindakan hukum verbal, yaitu keputusan, perintah dan peraturan. Keputusan merupakan pernyataan otoritatif berkenaan dengan hukum dari satu maupun sejumlah orang dalam interaksi hukum.⁶ Dalam hal keputusan berkaitan dengan adanya perintah. Kedua hal tersebut (keputusan dan perintah) berpijak

⁵ Lawrence M Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011, Hal. 15-17

⁶Ibid., Hlm. 33

pada pernyataan norma yang lebih umum, berupa peraturan.⁷ Namun dalam prakteknya sering kali sebuah sistem hukum menghasilkan keputusan-keputusan dan kemudian perintah.

Adapun bunyi Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait pewarisan bagi perempuan ialah:

“Sesudah 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali No. 01/Kep/PSM-3MDP Bali/X/2010, 15 Oktober 2010. Di SK ini, wanita Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Hanya jika kaum wanita Bali yang pindah ke agama lain, mereka tak berhak atas hak waris. Jika orangtuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal sukarela”.

Setiap aturan memiliki kebaikan masing-masing, dari perspektif situasi dan kondisi lingkungan masyarakat, pada waktu aturan itu dibuat. Sepanjang menyangkut mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga dan pewarisan, Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali yang relative lebih baik dibanding dengan ketentuan yang pernah ada sebelumnya.

Dalam Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) memuat asas-asas dalam hukum waris adat Bali. Pada prinsipnya, sistem pewarisan di Bali terdapat 4 (empat) asas penting yang harus diingat, yaitu antaranya asas kesatuan, asas ketergantungan, asas kebersamaan, dan asas keberlanjutan.⁸ Yang dimaksud dengan asas kesatuan adalah dalam pewarisan

⁷ Ibid., Hlm. 34

⁸ Hasil wawancara dengan I Wayan P. Windia Windia Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Ketua Panitia Pengarah Pesamuan Agung III MDP Bali, tanggal 25 November 2014

harus mengingat mengenai harta materiil dan non materiil. Dalam pewarisan, tidak diperkenankan hanya mengutamakan pembagian harta materiil saja, namun harus mengutamakan harta non materiil juga. Yang dimaksud dengan harta materiil merupakan harta yang berupa benda, harta kekayaan, sedangkan harta non materiil berupa kewajiban ahli waris setelah mendapatkan haknya. Yang mungkin menuntut haknya. Yang dimaksud dengan kewajiban disini adalah, kewajiban terhadap *Parhyangan*. Kewajiban terhadap *Pawongan*, dan kewajiban terhadap *Palemahan*.

Asas yang kedua yaitu asas ketergantungan, yaitu antara hak dan kewajiban oleh ahli waris harus berjalan seiringan, maksudnya adalah ketika ahli waris mendapatkan haknya berupa harta materiil, maka ahli waris juga harus memenuhi kewajibannya atas apa yang telah ia peroleh.

Asas yang ketiga yaitu asas kebersamaan, yaitu diharapkan pembagian harta dalam pewarisan dapat dibagi dan dinikmati bersama-sama dengan para ahli waris yang lain, tidak ada perebutan dan itikad buruk dari para ahli waris untuk menguasai harta secara penuh sehingga menghindari sengketa waris dalam keluarga. Asas yang terakhir yaitu asas keberlanjutan merupakan asas yang dimana harta warisan tidak dapat dihabiskan secara keseluruhan, karena harta tersebut harus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya. Maka harta warisan yang telah diperoleh harus dipisahkan terlebih dahulu untuk dilanjutkan dan sisanya untuk dinikmati.

Dalam Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) tidak ditentukan mengenai sanksi hukum apabila seseorang melakukan

pelanggaran. Karena sanksi adat hanya diberlakukan jika seseorang tidak melaksanakan keputusan kemudian merugikan masyarakat adat. Sanksi yang dimaksud dapat berupa sanksi yang berwujud *pamidanda* (hukuman) yaitu *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk pelaksanaan upacara), *artha danda* (hukuman berupa pembayaran sejumlah uang atau harta), dan *jiwa danda* (hukuman fisik dan psikis).

b. Struktur

Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris apabila dikaji dari segi struktur maka tidak terlepas dari Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yang memiliki wewenang dalam hal Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan ditingkat desa, membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di Kecamatan, di Kabupaten/Kota, dan di Provinsi berdasarkan ketentuan Perda Provinsi Bali Nomor 03/2001 tentang Desa Pakraman. MUDP adalah lembaga resmi daerah nonpemerintahan yang berdiri sendiri dan kedudukannya diperkuat oleh Perda Provinsi Bali tentang Desa Pakraman. Sebagai lembaga resmi daerah nonpemerintahan maka keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh MUDP bersifat mengikat seluruh desa pakraman di Bali dan wajib mendapatkan pengamanan pelaksanaan oleh seluruh instansi terkait di berbagai jenjang pemerintahan di Bali. Tahapan yang ditempuh untuk mensosialisasikan

keputusan MUDP Bali tersebut ke desa pakraman-desa pakraman diseluruh Bali melalui Pemerintah Daerah bidang kebudayaan, serta dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi guna meningkatkan SDM dalam mensosialisasikan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali ini. Adapun tahapan lainnya yaitu dengan menerbitkan dan menyebarkan informasi dalam bentuk fotocopy, brosur, buku-buku, dan dan hasil penelitian yang bermanfaat. Kemudian meningkatkan pemahaman karma desa pakraman tentang hasil-hasil keputusan Pesamuhan Agung melalui penerangan, penyuluhan dan *dharmatula*, bekerja sama dengan lembaga terkait baik pemerintahan maupun swasta. Program ini dilaksanakan secara bertahap dengan memerhatikan skala prioritas yang dibuat berdasarkan manfaat dan keadaan keuangan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.

c. Kultur hukum

Kultur hukum merupakan bagian dari kultur umum, opini, kebiasaan, cara berpikir, atau tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan yang mendekati atau menjauhi hukum. Apabila dilihat dari pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) maka tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ialah tindakan dan cara berpikir yang tidak mengikuti perkembangan jaman yang dapat dilihat dari terlalu kuatnya ideologi patriarki, yakni ideologi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang tinggi, karena budaya (culture) dimana sistem Patrilineal (*kapurusa*) yang mengikuti garis keturunan laki-laki tidak dapat diganggu gugat lagi, suku bangsa masyarakat Bali

yang terikat oleh kesatuan kebudayaan Bali dan diperkuat dengan adanya kesatuan Agama Hindu yang tidak lepas dengan Hukum Adat di Bali.

Prakteknya Keputusan Pesamuhan Agung III ini masih dikesampingkan dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini kurang efektif pelaksanaannya dalam masyarakat, karena masyarakat masih tetap kukuh menggunakan awig-awig yang ada sejak dulu sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Masih menggunakan *kuna dresta*. Walaupun Keputusan ini sudah disosialisasikan, namun tidak semua masyarakat yang mengetahui dan masih tetap dengan *awig-awig* atau tetap menggunakan *peswara* tahun 1900.⁹ Menurut I Wayan P. Windia, dari hasil wawancara pada tanggal 24 November 2014 mengemukakan bahwa keputusan ini tidak berjalan dengan penuh karena seperti dijelaskan dalam asas hukum waris adat Bali yaitu pada asas ketergantungan yaitu kewajiban yang diterima sesuai dengan hak yang diperoleh. sehingga perempuan tidak mungkin menuntut haknya apabila perempuan Hindu Bali tidak mampu memenuhi kewajibannya. Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini sudah mulai ada dan sudah berjalan selama 4 tahun, namun jalannya terseok-seok karena masalah tersebut, jika berani dengan kewajiban maka akan menerima hak, atau menuntut hak, itu sebabnya mengapa perempuan hanya mendapat setengah bagian. Seperti istilah yang sering kita dengar *sa'pikul sa gendong* atau *ategen asuun* (2;1), yaitu laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan I Made Parko, selaku Bendesa Adat Desa Batubulan Kangin tanggal 23 November 2014

mendapatkan satu bagian, berhak atas satu bagian dari harta *gunakaya* setelah dipotong 30 persen untuk kepentingan bersama dan menjadi bagian dari harta pusaka, ini diakibatkan karena wanita tidak mungkin melaksanakan kewajiban penuh.¹⁰ Kondisi ini menunjukkan suatu perubahan yang cukup penting karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati selama di rumah tanpa bisa menjadi ahli waris.

Sehingga dilihat dari kultur hukum, cenderung tidak melaksanakan peraturan tersebut yaitu Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris.

2. Hambatan dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait Kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris.

Setelah dilakukan analisis pada pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris dengan menggunakan teori penegakan hukum ternyata dalam pelaksanaan keputusan tersebut belum efektif. Suatu aturan dapat berlaku efektif atau tidak apabila antara substansi, struktur, dan kultur hukum berjalan sebagaimana mestinya sehingga suatu tujuan yang hendak dicapai dari peraturan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Akan tetapi efektif atau tidaknya Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman baik dari segi substansi, struktur, maupun dari kultur hukum pasti

¹⁰ Hasil wawancara dengan Wayan P.Windia (Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Ketua Panitia Pengarah Pesamuhan Agung III MDP Bali) tanggal 25 November 2014

dikarenakan ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya seperti dibawah ini:

a. Hambatan yang terkait dengan substansi

Hambatan yang dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris ialah dimana produk yang dihasilkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) yaitu Keputusan Pesamuhan Agung masih bersifat pasif, dan kurang bersifat aplikatif.

b. Hambatan yang terkait dengan struktur

Hambatan yang dikarenakan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Umum Desa Pakraman ini masih belum berjalan sepenuhnya, masih terjadi kekurangan dana untuk mensosialisasikan hasil dari Keputusan yang sudah ada dan sudah dibuat berdasarkan Pesamuhan Agung (rapat besar) yang dihadidiri oleh bendesa-bendesa adat Provinsi Bali dan diperlukan tanaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu Majelis Utama Desa Pakraman mensosialisasikan Keputusan dan masih terjadi pro dan kontra antara anggota yang tergabung didalam Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP).

c. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum

Hambatan yang dikarenakan Perempuan di Desa Batubulan Kangin sudah terpola pemikirannya bahwa perempuan tidak berhak mendapatkan warisan, sehingga tidak berani menuntut hak yang seharusnya bisa diperoleh, dan selama ini harta orangtuanya hanya bisa dinikmati selama perempuan belum kawin. Masyarakat adat Bali khususnya Desa Batubulan Kangin hanya

berpatokan pada ketentuan hukum adat berdasarkan awig-awig desa pakraman. Dari masyarakat sendiri tidak mau tau jika saat ini sudah ada perkembangan baru dalam bidang pewarisan, dan pemikiran masyarakat Desa Batubulan Kangin yang belum berkembang sehingga sulitnya menerima aturan baru yang dibuat karena mengikuti perkembangan jaman.

Sehingga kenyataan dalam prakteknya pewarisan hukum adat Bali, perempuan tidak memperoleh warisan dari keluarganya baik harta materiil maupun harta materiil. Karena beranggapan jika perempuan sudah kawin keluar maka sudah memutuskan hubungan kekeluargaannya, dan masuk dalam keluarga suaminya kemudian menjadi tanggung jawab dari suaminya.

- d. Upaya dalam Mengatasi Hambatan yang terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum

Setelah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terdapat beberapa hambatan yang terkait dengan substansi, struktur, dan kultur hukum maka harus dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan agar dapat berlaku efektif. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keputusan pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP):

1. Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Massif, sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan keputusan di masyarakat Bali khususnya Desa Batubulan Kangin.

2. Dengan menyatukan pendapat, dan kesadaran agar bersama-sama mengantarkan Bali terhadap sistem pewarisan yang lebih berkembang sehingga tidak lagi ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan Hindu di Bali.

Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) guna memberikan keadilan dalam hal waris terhadap perempuan Hindu Bali seperti yang diungkapkan oleh Ketua Panitia Pengarah Pesamuhan Agung III MDP Bali sebagai berikut:

Wawancara Bapak I Wayan P.Windia:¹¹

“Salah satu cara ialah agar masyarakat Hindu Bali khususnya di Desa Pakraman Batubulan Kangin dapat membuka diri, dan merubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya perempuan tidak berhak sebagai ahli waris sekarang perempuan sudah diperhitungkan haknya dalam Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Penanaman sikap dan tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan, dan harus membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan oleh Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman(MUDP) guna mengganti aturan lama”.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berupa data-data, dokumentasi dan dengan didukung wawancara sehingga diperoleh hasil yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris ini kurang efektif dalam masyarakat,

¹¹ Hasil Wawancara dengan I Wayan P.Windia Windia Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Ketua Panitia Pengarah Pesamuhan Agung III MDP Bali, tanggal 25 November 2014

karena masyarakat masih kukuh menggunakan awig-awig yang ada sejak dulu sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat

2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu sebagai ahli waris ialah:

- a. Hambatan yang terkait dengan substansi ialah keputusan pesamuan agung ini masih bersifat pasif dan kurang bersifat aplikatif
- b. Hambatan yang terkait dengan struktur ialah masih terjadi kekurangan dana untuk mensosialisasikan hasil dari Keputusan, dan masih ada pro dan kontra antara anggota yang tergabung dalam Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali.
- c. Hambatan yang terkait dengan kultur hukum ialah masih kuatnya hukum adat di desa ini dan sudah terpolanya pemikiran para perempuan Bali bahwa perempuan tidak berhak memperoleh warisan, sehingga Keputusan ini belum sepenuhnya bisa terlaksanakan di Desa Batubulan Kangin.

Sedangkan upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris adalah:

- a. Penyebarluasan hasil keputusan secara Sistematis, Terstruktur dan Masif sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan keputusan di masyarakat Bali khususnya Desa Batubulan Kangin.
- b. Perlu adanya kesadaran dari MUDP agar bersama-sama mengantarkan Bali terhadap sistem pewarisan yang lebih berkembang sehingga tidak

lagi ada ketidakadilan dalam hukum adat waris yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan Hindu di Bali.

- c. Masyarakat Hindu Bali khususnya di Desa Pakraman Batubulan Kangin dapat membuka diri, dan merubah pola pikir.

SARAN

1. Bagi Masyarakat adat Bali khususnya di daerah Desa Batubulan Kangin disarankan agar mampu membuka pikiran, dan dapat menerima bahwa ada keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman, yang bertujuan agar memberikan pencerahan terhadap masyarakat untuk memperhitungkan kedudukan perempuan di Bali.
2. Kepada penegak hukum khususnya hakim, disarankan agar dalam menjalankan tugasnya agar lebih mengutamakan Keputusan Pesamuhan Agung III (MUDP) sebagai rujukan dalam menyelesaikan perkara warisan menurut hukum adat Bali
3. Kepada Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) disarankan agar lebih mensosialisasikan hasil-hasil keputusan, sehingga masyarakat dapat menerima dan melaksanakan hasil keputusan dari MUDP.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lawrence M Friedman, **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial**, Nusa Media, Bandung, 2011.

I Nengah Lestawi, **Hukum Adat**, Paramita, Surabaya, 1999.

Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan asas-asas hukum adat**, PT toko gunung agung, Jakarta, 1967.

PERATURAN DAERAH

Perda Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman